

ANALISIS EFEKTIVITAS PNPM SEBAGAI CARA PENGURANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus di Kecamatan Pleret Bantul)

Tri Siwi Nugrahani

Universitas PGRI Yogyakarta,
Jl. PGRI I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta

Abstrak

Masalah kemiskinan sudah ada sejak dulu hingga saat ini, dan terjadi baik di kota maupun di desa bahkan di negara maju sekalipun. Di Indonesia masalah kemiskinan masih didominasi di pedesaan, karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia, dan terbatasnya pemilikan lahan yang rata-rata kurang dari 0,5 hektar. Demikian pula kemiskinan yang terjadi di wilayah kecamatan Pleret Bantul perlu dievaluasi apakah kemiskinan di wilayah tersebut masih banyak penduduk yang miskin terutama untuk petani. Sesungguhnya pemerintah telah berupaya mengurangi kemiskinan, seperti mengadakan program PNPM. Namun sejauh ini pelaksanaan PNPM jarang dievaluasi terutama berkaitan dengan pengurangan jumlah kemiskinan.

Studi ini bertujuan menguji kemiskinan yang ada di kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Pleret untuk melihat pelaksanaan PNPM berkaitan dengan cara mengurangi kemiskinan. Berdasar hasil analisis profil dan analisis deskriptif dari pertanyaan yang ditujukan pada responden menunjukkan bahwa dari 78 responden yang menjadi anggota PNPM paling banyak wanita yaitu 70 orang dan pria hanya 7 orang. Sedangkan kelompok yang memanfaatkan dana bergulir PNPM adalah kelompok Keputren Lestari terdapat 10 kali frekwensi peminjaman. Ditinjau dari frekwensi pembayaran rata-rata kelompok membayar 12 kali dalam satu tahun yang secara umum 1 kali satu bulan, yaitu 10 orang. Anggota masih kurang inovasi hal ini berkaitan dengan jenis usaha yang sudah dilakukan dengan rencana pengembangan usaha, sebagian besar responden menjalankan usaha dengan dagang kelontong, dan kurang melakukan inovasi seperti memproduksi kerajinan. Hanya sedikit anggota PNPM yang memanfaatkan dana bergulir dan pengelola PNPM kurang memantau hasil produksi tetapi lebih memperhatikan kelancaran pembayaran dana PNPM. Dana tawaran PNPM mampu mengembangkan usaha anggota.

Kata kunci: PNPM, dan kemiskinan.

Abstract

The problem of poverty has been used since to date, and occurs both in the cities and villages even in developed countries. In Indonesia is still dominated by the poverty problem in rural areas, because of the low quality of human resources, and lack of land ownership on average less than 0.5 hectares. Similarly, poverty in the sub-districts of Bantul Pleret needs to be evaluated whether poverty in the region is still a lot of poor people, especially for farmers. Indeed the government has sought to reduce poverty, such as holding PNPM program. But so far the implementation of PNPM rarely evaluated primarily concerned with the reduction of poverty.

This study aims to examine poverty in the district especially in the district of Bantul Pleret to see the implementation of PNPM related to reducing poverty. Based on the results of the profile analysis and descriptive analysis of the questions directed at the respondents indicated that of the 78 respondents who are members of PNPM most women and men are 70 people only 7 people. Whereas those who take advantage of

the revolving fund is a group Keputren Sustainable PNPM contained 10 times the frequency of borrowing. Judging from the frequency of payment of the group average pay 12 times in a year that is generally 1 times a month there are 10 people. Members still lacking innovation it relates to the type of business that is done with business development plans, the majority of respondents do business with the grocery trade, and less innovation as producing handicrafts. Only a few members of PNPM that utilize revolving funds and managers monitor production PNPM less but pay more attention to the smooth payment of PNPM funds. PNPM funds offer member business development.

Keywords: *PNPM, and poverty.*

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa konsep-konsep pembangunan di negara berkembang menemui kegagalan dalam mengentaskan kemiskinan, karena memisahkan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Padahal terbukti keberhasilan negara-negara industri maju terjadi karena penekanan yang diberikan pada bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu perlu merefleksi tentang upaya mengatasi kesenjangan yang terjadi khususnya bagi masyarakat miskin yang semakin jauh dari kesejahteraan. Salah satu upaya mengatasi hal tersebut adalah meletakkan strategi pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan menyangkut hak-hak dasar masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2005 : 15).

Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 berkaitan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur bentuk perhatian pemerintah terhadap pengurangan kemiskinan. Salah satu upaya mengurangi kemiskinan yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan simultan dengan memperhatikan penyediaan perumahan murah, kesehatan dan pendidikan gratis bagi keluarga miskin dan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).

PNPM adalah program nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Mekanisme sistem PNPM

berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk menciptakan kapasitas masyarakat baik secara individu atau kelompok dalam memecahkan persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.

Pemerintah perlu memiliki konsep strategi pemberdayaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang sudah dirintis sejak tahun 2006. Pemberdayaan masyarakat melalui PNPM berkaitan dengan salah satu tujuan pembangunan milenium MDGs yaitu memberantas kemiskinan (Wuri, 2009).

Namun, pelaksanaan PNPM belum sepenuhnya secara efektif mampu mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut dilihat pada pemberdayaan PNPM yang masih bergelut pada masalah klasik seperti rendahnya produktivitas, dan kesulitan akses terhadap sumberdaya produktif. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan upaya yang dapat mendorong pembangunan usaha baru dari kalangan masyarakat sendiri yaitu menjadikan PNPM secara efektif. Oleh karena itu pelaksanaan PNPM perlu dievaluasi dan dikaji guna mengetahui efektivitas pelaksanaan PNPM dalam mengurangi kemiskinan sehingga menimbulkan minat peneliti untuk menginvestigasi apakah pelaksanaan PNPM yang dilakukan di wilayah Yogyakarta telah berjalan efektif atau belum, maka penelitian ini diberi judul "Analisis Efektivitas PNPM dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan."

B. Rumusan Masalah

PNPM yang menjadi program pemerintah di D.I. Yogyakarta memerlukan pengawasan dan penilaian, oleh karena itu diperlukan umpan balik dari penerima dana PNPM tentang efektivitas program PNPM yang sudah berjalan, maka identifikasi masalah adalah:

- a. Bagaimana PNPM di D. I. Yogyakarta?
- b. Bagaimana persepsi penerima PNPM tentang dana yang digulirkan dari pemerintah?
- c. Bagaimana efektivitas PNPM di D. I. Yogyakarta?

Kajian Pustaka

A. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Indonesia masih didominasi di pedesaan, dan sebagian bekerja disektor pertanian. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan. Masyarakat miskin dipedesaan dihadapkan pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan yang rata-rata kurang dari 0,5 ha, banyaknya rumah tangga yang tidak mempunyai aset, terbatasnya alternatif lapangan kerja belum tercukupinya pelayanan publik, lemahnya kelembagaan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam menentukan produk yang dihasilkan.

Beberapa garis batas kemiskinan yang sering digunakan antara lain:

- a. Ukuran dari Sayogyo.

Sayogyo memberikan batas garis kemiskinan untuk masyarakat pedesaan setara dengan 20 kg beras perkapita perbulan, dan bagi masyarakat perkotaan sama dengan 30 kg beras perkapita per bulan. Sebelum menetapkan ukuran beras perkapita perbulan sebagaimana disebutkan diatas, ukuran yang digunakan Sayogyo untuk kategori penduduk miskin adalah pengeluaran perkapita per tahun kurang dari 320 kg beras untuk

penduduk pedesaan, dan 480 kg beras untuk penduduk perkotaan.

Sedangkan pengeluaran setara atau kurang dari 180 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 270 kg beras bagi penduduk perkotaan dijadikan batas bagi kelompok penduduk paling miskin.

- b. Batasan Menurut Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan berdasarkan tingkat kecukupan konsumsi kalori yaitu 2.100 kalori per kapita per hari. Suatu keluarga digolongkan sangat miskin jika pendapatannya hanya mampu memenuhi kebutuhan minimum kalori yang ditetapkan, sedangkan bila pendapatannya selain mampu mencukupi kebutuhan kalornya juga mampu memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, air, sandang, dan pendidikan digolongkan sebagai keluarga miskin.

- c. Ukuran Sam F. Poli.

Sam F. Poli menyatakan bahwa batas garis kemiskinan di Indonesia bagi masyarakat pedesaan adalah sama dengan 27 kg ekuivalen beras perkapita per bulan dan untuk masyarakat perkotaan sama dengan 40 kg beras perkapita perbulan. Ukuran Sam F. Poli ini lebih tinggi dari ukuran yang diusulkan oleh Sayogyo.

- d. Ukuran Bank Dunia.

Bank Dunia menetapkan ukuran garis kemiskinan untuk Indonesia berdasarkan pendapatan perkapita. Penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional termasuk dalam kategori miskin. Secara umum Bank Dunia menetapkan garis batas kemiskinan sebesar US \$1 perhari bagi negara-negara berkembang dan US\$ 2 bagi negara-negara maju.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (2000), masyarakat miskin secara umum ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (*powerlessness*) dalam hal:

- a. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan,

- pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*).
- b. Melakukan kegiatan usaha produktif (*unproductiveness*).
 - c. Menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi (*inaccessibility*).
 - d. Menentukan nasibnya diri sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (*vulnerability*); dan
 - e. Membebaskan diri dari mental budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

Mengukur kemiskinan tidak mudah, karena sangat tergantung pada interpretasi miskin. Misalnya secara psikologis, seseorang merasa miskin karena muncul suatu perasaan dari individu-individu anggota masyarakat yang selalu membandingkan dirinya dengan individu lain dalam suatu masyarakat (*reference group*), di mana ia menjadi bagian dari miskin. Kemiskinan terjadi di mana saja, termasuk di negara-negara maju yang secara absolut masyarakatnya telah jauh di atas garis kemiskinan. Jepang sebagai negara *post industry*, rata-rata pendapatannya telah jauh melampaui garis kemiskinan absolut, tetapi masih banyak pula orang Jepang yang merasa dirinya miskin. Ini terjadi karena perasaan relatif (Winarni, 1994).

Menurut Whyte dalam Ahluwalia (1976), terdapat dua macam kemiskinan, yakni kemiskinan yang bersifat relatif dan kemiskinan yang bersifat absolut (*relative and absolute poverty*). Kemiskinan absolut adalah ukuran kemiskinan yang menggunakan indikator-indikator empiris seperti tingkat kelaparan, malnutrisi, buta huruf, perkampungan kumuh, buruknya tingkat kesehatan, dan lain-lain. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan diukur relatif antar kelompok pendapatan, oleh karenanya selalu dinamis. Hakikat kemiskinan ini tidak dilihat dari indikator-indikator ekonomi, namun menyangkut aneka dimensi sosial.

2. Penyebab Kemiskinan

Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bapenas, 2005 : 15). Masalah kemiskinan juga ditandai oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat. Berbagai indikator pembangunan manusia dan indikator kemiskinan menunjukkan keteringgalan Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Philipina.

Permasalahan kemiskinan dilihat dari aspek pemenuhan dasar, beban kependudukan, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dapat dilihat dari terbatasnya : kecukupan dan mutu pangan; akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha, layanan perumahan, layanan air bersih dan aman, serta sanitasi; lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; memburuknya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; lemahnya jaminan rasa aman; dan lemahnya partisipasi.

Kemiskinan dapat disebabkan beberapa faktor, seperti yang dikemukakan oleh Sharp dkk, (1976) dalam Wuri (2009) yang mengidentifikasi penyebab kemiskinan dapat dipandang dari sisi ekonomi, yaitu: ada ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, ada perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan produktivitas rendah sehingga upah yang diterima juga rendah. Selain itu kemiskinan disebabkan ada perbedaan akses dalam modal. Kemiskinan memang tidak dapat dihilangkan, namun perlu dilakukan upaya pengurangan jumlah kemiskinan. Hal ini yang terus diupayakan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, salah satu cara mengentaskan kemiskinan yaitu dengan memberdayakan masyarakat melalui PNPM.

3. Kemiskinan dan Arah Kebijakan Pembangunan

Pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dititikberatkan kepada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus sebagai sumberdaya manusia pembangunan yang harus senantiasa ditingkatkan kualitas dan martabatnya. Pembangunan yang bertumpu pada peran serta masyarakat (*people driven*) dilaksanakan secara merata di semua lapisan masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi, dan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang nantinya menjadi ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat (sosial). Dengan demikian kemiskinan merupakan masalah bersama antara pemerintah, masyarakat dan segenap pelaku ekonomi.

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (1999), Keadaan kemiskinan pada umumnya diukur dengan tingkat pendapatan dan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Selain itu, berdasarkan pola waktunya kemiskinan dapat dibedakan menjadi: *persistent poverty*, *cyclical poverty*, *seasonal poverty*, dan *accidental poverty*. *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Umumnya menimpa wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang kritis dan atau terisolasi. *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti yang terjadi pada usahatani tanaman pangan dan nelayan. Pola yang lain adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Penduduk miskin erat kaitannya dengan wilayah miskin. Wilayah dengan potensi daerah yang tertinggal besar kemungkinan menyebabkan penduduknya miskin. Oleh karena itu pendekatan pemecahan kemiskinan dapat pula dilakukan

terhadap pengembangan wilayah atau desa yang bersangkutan.

Apabila dikaji terhadap faktor penyebabnya, maka terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Hal ini disebabkan oleh keadaan kepemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan yang tidak merata pula.

Menurut Sumitro Maskun (1997) Kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan kondisi keterisolasian, motivasi dan kesadaran untuk lepas dari kungkungan kemiskinan yang menghimpit. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, maka kebijaksanaan dituangkan dalam tiga arah kebijaksanaan. Pertama kebijaksanaan tidak langsung yang diarahkan kepada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; kedua kebijaksanaan langsung yang ditujukan pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijaksanaan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Saat ini, mengingat pentingnya program kemiskinan, pemerintah telah menyusun lembaga, dan strategi, kebijakan dan program yang mudah dan implemtatif. Untuk pemerintah kabupaten, lembaga yang berkompeten dengan kemiskinan adalah: BKKBN, Depkes, Depdiknas, BPS, PMK, Bagian Sosial, dan sebagainya.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Internal lebih banyak melibatkan faktor sumberdaya

manusianya, sedangkan faktor eksternal menunjukkan kondisi yang lebih kompleks karena satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Oleh karenanya, program akan berjalan efektif apabila memperhatikan unsur kedua-duanya. Kebijakan yang keliru dapat menyebabkan suatu keadaan kemiskinan yang semakin mengkhawatirkan. Ketidakmampuan masyarakat dalam menyediakan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan, merupakan tantangan bagi seluruh *stake holder*.

Berbagai persoalan agraria dan pertanian mempunyai implikasi luas terhadap kehidupan petani/buruh tani. Agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tersendat membuat petani/buruh tani semakin tidak berdaya. Dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi kerakyatan dan pertumbuhan yang tidak merata menimbulkan tingginya tingkat kemiskinan (Maswita Djaya, 2006 :6).

Mengukur kemiskinan tidak mudah, karena sangat tergantung pada interpretasi miskin. Misalnya secara psikologis, seseorang merasa miskin karena muncul suatu perasaan dari individu-individu anggota masyarakat yang selalu membandingkan dirinya dengan individu lain dalam suatu masyarakat (*reference group*) dan seseorang tersebut menjadi bagian dari miskin. Kemiskinan terjadi di mana saja, termasuk di negara-negara maju yang secara absolut masyarakatnya telah jauh di atas garis kemiskinan. Jepang sebagai negara *post-industry*, rata-rata pendapatannya telah jauh melampaui garis kemiskinan absolut, tetapi masih banyak pula orang Jepang yang merasa dirinya miskin. Ini terjadi karena perasaan relatif (Winarni, 1994)

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensi, sehingga secara umum masyarakat miskin adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya secara layak. Mengingat persoalan struktural dan multidimensi tersebut, maka upaya penanggulangan sebaiknya diletakkan dan

dipercayakan kepada masyarakat itu sendiri, tentunya dengan didukung dan difasilitasi oleh pemerintah, maupun pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil lainnya, sehingga proses penanggulangan kemiskinan akan menjadi suatu gerakan masyarakat yang akan menjamin potensi kemandirian dan keberlanjutan guna meningkatkan kehidupannya yang lebih layak (Sukei, K. 2008: 1).

Terdapat dua macam kemiskinan, yakni kemiskinan yang bersifat relatif dan kemiskinan yang bersifat absolut (*relative and absolute poverty*). Kemiskinan absolut adalah ukuran kemiskinan dengan mengindikasikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan diukur relatif dengan mengindikasikan pangsa pendapatan nasional yang diterima masing-masing golongan pendapatan (Kuncoro, 1997; Todaro, 2004, Staff kementerian Bidang Kesra RI, 2007).

Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan bersifat masal dan parah pada umumnya terdapat di negara berkembang. Namun, terdapat bukti bahwa kemiskinan juga ada di negara maju. Di negara berkembang, kemiskinan sangat terkait dengan aspek struktural. Misalnya sistem ekonomi yang tidak adil, merajalela KKN, ada diskriminasi sosial, atau tidak ada jaminan sosial. Sedangkan kemiskinan di negara maju lebih bersifat individual. Misalnya mengalami kecacatan (fisik atau mental), ketuaan, sakit yang parah dan berkepanjangan, atau kecanduan alkohol. Kondisi ini biasanya melahirkan tuna wisma yang berkelana kesana kemari atau keluarga tunggal, yang secara umum dialami ibu-ibu yang hidupnya tergantung pada bantuan sosial dari pemerintah, seperti kupon makanan atau tunjangan keluarga (Suharto, 2009). Oleh karena itu selain memahami permasalahan kemiskinan perlu memahami pula masalah pemberdayaan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred participatory, empowering and sustainable*” (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*) yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Upaya untuk meningkatkan peranan masyarakat sangat berorientasi pada pembangunan ekonomi melalui keaktifan atau partisipasi masyarakat. Selain itu konsep ini juga memfokuskan pokok permasalahan pada upaya memaksimalkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional (Hasbi Berliani, 2007).

Konsep pemberdayaan masyarakat muncul karena ada kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Friedman (1992) dalam Ginanjar (1997)).

Studi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh Fillali dan Usman (2007) yang mengevaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Tapanuli. Berdasar evaluasi ditemukan perlunya suatu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang bertugas membantu terlaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada forum tersebut, masing-masing dinas membuat prioritas dari daftar usulan yang diajukan dengan mengacu pada renstra (Fillaili dan Usman, 2007). Pelibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan

dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menciptakan rasa memiliki masyarakat luas atas kegiatan pembangunan yang berlangsung.

Pengembangan model pemberdayaan masyarakat juga dievaluasi oleh Mimin Karmini (1999) dalam pemecahan masalah penanggulangan bencana di Bandung. Model pemberdayaan masyarakat sangat perlu untuk dilakukan karena mampu melihat permasalahan yang terjadi di wilayah tertentu, dengan melibatkan peranserta masyarakat untuk mengatasi permasalahan wilayah sekitar.

B. Mekanisme Upaya Pengentasan Kemiskinan

Di tengah kondisi kemiskinan yang semakin rumit ini, kebijakan pemerintah masih berkutat di sekitar pertanyaan siapa mengerjakan apa dan belum fokus pada memerangi kemiskinan (Heryawan dan Usman, 2007). Sampai sekarang, lembaga penanggulangan kemiskinan belum cukup berhasil melakukan koordinasi lintas sektoral dan belum mampu membangun sinergi antarpelaku pembangunan dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.

Tuntutan keterlibatan Pemda dalam penanggulangan kemiskinan semakin jelas dengan diluncurkannya Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) oleh Pemerintah Pusat pada 2005 yang menyatakan perlunya kontribusi semua pemangku kepentingan, termasuk pemda, dalam upaya bersama untuk mengurangi kemiskinan. Pada kenyataannya, masing-masing daerah mempunyai kapasitas kelembagaan yang berbeda dalam penanggulangan kemiskinan diakibatkan oleh, antara lain, tingkat keterlibatan organisasi yang ada di daerah tersebut, kondisi kemiskinan, dan latar belakang geografis daerah (Liza Hadiz, 2007).

Penurunan jumlah penduduk miskin akan lebih cepat bila Pemda mengembangkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal APBD, hasil-hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa bagaimana dana APBD dibelanjakan lebih penting

artinya daripada berapa jumlah dana APBD yang tersedia. Kedua, praktik tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh kebijakan ekonomi yang propasar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hanya melalui pertumbuhan ekonomilah masyarakat miskin di tiap daerah dapat mengembangkan potensinya dan meraih peningkatan pendapatan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, sasaran penanggulangan kemiskinan berkesinambungan di daerah dapat dicapai hanya bila pemda terkait memiliki kapasitas untuk: (1) memberdayakan penduduk miskin; (2) mengembangkan kapasitas penduduk miskin dengan meningkatkan layanan-layanan dasar; (3) menyediakan kesempatan ekonomi melalui peningkatan akses terhadap pasar; (4) menyediakan jaminan keamanan dari guncangan ekonomi dan dari tindak korupsi, kejahatan, dan kekerasan; dan (5) menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi kegiatan investasi dan usaha sehingga ekonomi daerah dapat tumbuh dengan cepat.

C. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)

Kebijakan PNPM sebagai salah satu program pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan pembangunan daerah yang merujuk pada pembangunan nasional yakni pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Program pemerintah yang terpilih baik antar aspek maupun sub aspek dalam mengentaskan kemiskinan perlu dipadukan menjadi beberapa program yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan rumah tangga miskin di semua aspek dan dapat berkesinambungan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat rumah tangga miskin, meningkatkan peluang kerja dan memberantas kemiskinan (Papanek, G. 2007; Tri Sunarno, dkk., 2010).

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang tergolong berhasil yaitu program PNPM Mandiri (2008). Program PNPM Mandiri lebih ditekankan pada masyarakat

yang lebih berperan aktif mulai pemilihan program hingga monitoring dan evaluasinya (monev). Program-program yang bersifat *top-down* tingkat keberhasilannya rendah, karena masyarakat tidak dilibatkan dalam menentukan program dan tidak terlibat dalam monev. Masyarakat merasa mendapatkan hibah dari pemerintah dan tidak perlu mengembalikan lagi (khususnya program kredit usaha mikro). Dengan demikian perguliran dana akan terhenti. Program-program yang bersifat murni *bottom-up* pun masih belum optimal, meskipun tingkat kegagalannya tidak sebesar *top-down*. Masyarakat sasaran program adalah masyarakat kurang mampu dalam segala aspek, sehingga dalam penentuan program dan monev tidak semuanya ditentukan oleh penerima program.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kombinasi *top-down* dan *bottom-up* dalam menentukan program kemiskinan. Pada proses penentuan program perlu melibatkan masyarakat dan pada saat penentuan program, masyarakat perlu didampingi oleh tenaga ahli (*expert*) yang mengerti dengan permasalahan di lokasi.

Model-model seperti ini diperkirakan akan meningkatkan keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas*) Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 100 kabupaten rawan pangan yang tersebar di 23 propinsi, dengan rincian 30 kabupaten prioritas I, 30 kabupaten prioritas 2 dan 40 kabupaten prioritas 3. Kelompok rawan pangan prioritas 1,2 dan 3 menunjukkan kabupaten-kabupaten yang harus mendapatkan prioritas khusus dalam penanganan masalah kerawanan pangan. Sedangkan sisanya (165 kabupaten) masuk dalam kelompok tahan pangan (prioritas 4,5 dan 6), dengan rincian 50 kabupaten prioritas 4, 50 kabupaten prioritas 5 dan 65 kabupaten prioritas 6.

Dalam rangka penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan tersebut dilaksanakan kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Rawan Pangan dengan

fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian.

Melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan diharapkan masyarakat desa rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternative peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, dan akhirnya tercapai kemandirian masyarakat.

Tujuan Program Aksi Desa Mandiri Pangan adalah untuk meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi.

Dalam pelaksanaannya, Program Aksi Desa Mandiri Pangan akan difasilitasi dengan masukan antara lain: instruktur, pendamping dalam bidang manajemen kelompok dan usaha serta teknis, bantuan permodalan, sarana dan prasarana, tenaga kerja serta teknologi. Berbagai masukan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan seperti pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pelatihan, fasi-litasi dan penguatan kelembagaan), harmonisasi system ketahanan pangan dan pengembangan keamanan pangan serta anti-sipasi maupun penanggulangan kerawanan pangan.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan dalam mengelola aspek ketersediaan dan distribusi pangan dengan gizi seimbang dan aman, dan mampu mengatasi masalah pangan serta mampu membentuk aliansi untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam melawan kelaparan dan kemiskinan, sehingga diharapkan dapat menurunkan kerawanan pangan dan gizi.

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program aksi mandiri pangan antara lain melalui : (a) penerapan prinsip pemberdayaan masyarakat, dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menolong dirinya sendiri; (b) penguatan kelembagaan pedesaan dalam membangun ketahanan pangan dan gizi, peningkatan pendapatan, akses dan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang, sanitasi lingkungan serta antisipasi situasi darurat; (c). optimalisasi pemanfaatan sumber daya dengan dukungan multi sektor dan multi disiplin; (d) sinergitas antar stakeholder yang diwujudkan melalui peningkatan kemampuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam bekerjasama dengan stakeholder lain dan memfasilitasi Tim Pangan di tingkat desa.

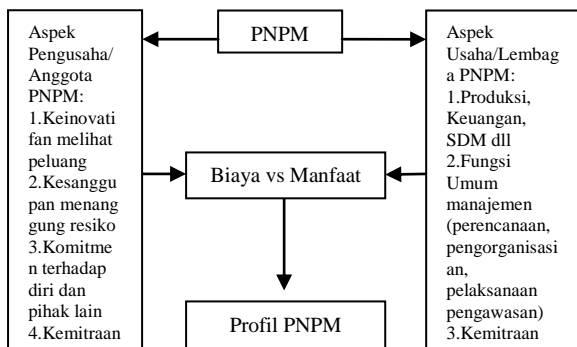
D. Rancangan Teoritis Model PNPM Efektif dalam Pengentasan Kemiskinan

Upaya pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan sudah dilakukan oleh Indriyati dan Nugrahani (2010) dengan membuat sistem strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan dengan mempertimbangkan potensi yang ada. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberikan pendampingan melalui pendekatan humanistik (Indriyati, dkk, 2009). Selain itu pengurangan kemiskinan dapat pula dengan memberi motivasi dan pendampingan manajemen usaha sehingga mampu meningkatkan penghasilan yang akhirnya akan mengurangi kemiskinan pada kelompok perempuan.

Studi yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan sudah dilakukan oleh Indriyati, dkk. (2009) dan Indriyati dan Nugrahani (2010) tetapi masih terbatas pada kelompok usaha perempuan di daerah Bantul dan Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dengan memperluas

domain dari penelitian sebelumnya yaitu dengan menganalisis efektivitas pelaksanaan PNPM yang ada di D.I.Yogyakarta dan tidak terbatas pada perempuan saja.

Gunari (2007) melakukan studi berkaitan dengan model UKM sukses yang terdiri dari dua bagian utama penciri keberhasilan suatu usaha, yaitu aspek usaha dan aspek pengusaha yang kemungkinan dapat diimplikasikan pada PNPM sebagai acuan untuk menganalisis efektivitas PNPM.



Gambar 1. Profil PNPM

Metode Penelitian

A. Jenis dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan deskriptif dengan menggunakan pendekatan observasi dan survey pada PNPM yang ada di D. I. Yogyakarta. Sedangkan sampel penelitian ini adalah PNPM (unit usaha) dan anggota (individu/kelompok) PNPM.

B. Sumber Data dan Teknik

Pengumpulan Data

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden sampel yaitu anggota, dan pengurus PNPM. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik acak terbatas (*purposive random sampling*). Data sekunder akan dikumpulkan dari Pembina instansi terkait (PNPM) dan data Bapeda. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur.

C. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan metoda komparatif, yaitu membandingkan kondisi ideal dan kondisi riil di lapangan, pendapat-pendapat dari berbagai unsur yang terlibat pembinaan PNPM dan dari tenaga ahli serta dari studi pustaka.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Profil Responden

Responden penelitian ini terdiri dari 78 orang yang mengikuti program PNPM di DIY, dengan menyebar di 4 (empat) wilayah yaitu: di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul, sedangkan untuk di wilayah Kodya Yogyakarta tidak disertakan karena program berbeda, apabila di kota yaitu program P2KP. Profil responden berdasar jenis kelamin, usia, dan wilayah dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut:

1. Profil Berdasar Jenis Kelamin, Usia, dan Wilayah

Berdasar jenis kelamin menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah wanita yaitu 71 orang atau 91% dari total responden sedangkan pria hanya 7 orang atau 9%. Hal ini menunjukkan yang lebih aktif dalam kegiatan PNPM adalah perempuan. Sedangkan berdasar usia menunjukkan umur responden antara 25 tahun hingga 34 tahun sebanyak 7 orang, usia responden 35-44 tahun sebesar 28 orang, sedangkan paling banyak responden berusia 45-54 tahun. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden dalam usia produktif, bahkan usia diatas 44 tahun masih aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, terlebih lagi paling tua responden berusia 65 tahun yang giat dalam kegiatan PNPM. Adapun rincian profil responden berdasar jenis kelamin dan usia dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Profil responden (n=78)

No	Keterangan	Jumlah	Persentase	
1	Berdasar jenis Kelamin	Pria	7	8,97%
		Wanita	71	91,03%
2	Berdasar Umur	25 – 34 th	7	8,97%
		35 – 44 th	28	35,89%
		45 – 54 th	32	41,02%
		55 – 64 th	10	12,82%
		>64 th	1	1,28%
Total		78		

2. Profil Berdasar Wilayah

Profil responden berdasar wilayah menunjukkan sebagian besar responden bertempat tinggal di Bantul yaitu 51 orang, di Kulon Progo 6 orang, Sleman 14 orang, dan Gunung Kidul 7 orang. Berikut Tabel 2 menunjukkan responden berdasar wilayah.

Tabel 2. Profil responden berdasar Wilayah

No	Berdasar Wilayah	Jumlah	Persentase
1	Sleman	14	17,95%
2	Kulon Progo	6	7,69%
3	Bantul	51	65,38%
4	Gunung Kidul	7	8,98%
Total		78	

3. Profil Berdasar Lama Menjadi Anggota PNPM

Berdasar lama responden menjadi anggota PNPM dapat ditunjukkan paling lama responden ikut anggota PNPM selama 11 tahun ada 8 orang atau 10,3% dari total responden sedangkan sebagian besar lamanya responden menjadi anggota PNPM selama 2 tahun yaitu 26 orang atau 33,3 % dari total responden. Berikut Tabel 3 menunjukkan profil berdasar lama anggota ikut PNPM.

Tabel 3. Profil berdasar lama keanggotaan PNPM

No	Berdasar lama anggota	Jumlah	Prosentase
1	1 tahun	11	14,10%
2	2 tahun	26	33,33%
3	3 tahun	20	25,65%
4	4 tahun	7	8,97%
5	5 tahun	2	2,57%
6	6 tahun	4	5,12%
7	11 tahun	8	10,26%
Total		78	100%

4. Profil Berdasar Jenis kelompok yang memanfaatkan dana PNPM

Berdasar Jenis kelompok yang memanfaatkan dana PNPM dapat ditunjukkan bahwa terdapat 26 kelompok pemanfaatan dana PNPM. Paling banyak kelompok Keputren Lestari yang memanfaatkan dana bergulir PNPM. Terdapat 4 kelompok dasa wisma yang memanfaatkan dana PNPM, yaitu kelompok dasa wisma Kerto Tengah, Kloron, Keputren, dan Segoroyoso. Berikut Tabel 4 menunjukkan profil berdasar jenis kelompok yang memanfaatkan dana PNPM.

Tabel 4. Profil Berdasar Jenis kelompok yang memanfaatkan dana PNPM

No	Kelompok	Frek	%
1	Bina Sejahtera	5	6.4
2	Ceme	8	10.3
3	Dawis Kerto Tengah	3	3.9
4	Dawis I Kloron	3	3.9
5	Dawis Keputren	1	1.3
6	Dawis Segoroyoso	1	1.3
7	Kauman	2	2.6
8	Keputren Lestari	10	12.8
9	Makmur Jaya	3	3.8
10	Mandiri	5	6.4
11	Mawar Kauman	1	1.3
12	Pkk Wonolelo	2	2.6
13	Restu Bunda	4	5.1
14	Sembodro	8	10.3
15	Spp Anggrek	2	2.6
16	Spp Dahlia	1	1.3
17	Spp Mawar	2	2.6
18	Spp Mekar	3	3.8
19	Spp Permata Bunda	1	1.3
20	Spp Sakura	2	2.6
21	Uppks Dlingo	5	6.4
22	Uppks Seroja	6	7.7
Total		78	100.0

5. Profil Berdasar Suku Bunga Dana Bergulir PNPM

Berdasar suku bunga dana bergulir PNPM dapat ditunjukkan bahwa suku bunga dana bergulir PNPM rata-rata 1,5 % perbulan. Suku bunga PNPM lain yang ditawarkan yaitu 1 persen dan 1,67 persen perbulan.

Berikut Tabel 5 menunjukkan profil berdasar suku bunga dana bergulir PNPM.

Tabel. 5. Profil Berdasar Suku Bunga Dana PNPM

No	Suku Bunga	Frek	Prosentase
1	Per bulan	5	6.4
2	1.50 per bulan	65	83.3
3	1.67 per bulan	8	10.3
Total		78	100.0

6. Profil Berdasar Modal Awal Usaha

Berdasar modal awal usaha dari anggota PNPM ketika melakukan usaha pertama kali yaitu modal sejumlah Rp. 1.000.000 dan ada 23 orang, sedangkan modal awal yang paling tinggi yaitu Rp. 10.000.000 ada 1 orang responden, sedangkan modal awal usaha yang paling rendah yaitu Rp. 500.000 dan ada 7 orang yang membuka usaha dengan modal tersebut. Berikut Tabel 6 menunjukkan profil berdasar modal awal usaha sebagai berikut:

Tabel. 6. Profil Berdasar Modal Awal Usaha

No	Modal Awal	Jumlah	Persentase
1	500000	7	9.0
2	1000000	23	29.5
3	1500000	3	3.8
4	2000000	21	26.9
5	2500000	2	2.6
6	3000000	12	15.4
7	5000000	7	9.0
8	6000000	1	1.3
9	7000000	1	1.3
10	10000000	1	1.3
Total		78	100.0

7. Profil Berdasar Jenis Usaha

Berdasar jenis usaha yang dilakukan responden dalam memanfaatkan dana PNPM terbagi menjadi 3 bagian yaitu : kerajinan, pertanian dan perikanan, dan dagang. Berdasar hasil survey menunjukkan paling banyak responden sebagai pedagang kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari yaitu ada 50 orang. Sedangkan jenis usaha lain seperti usaha kerajinan bambu dan pertanian atau perikanan kurang lebih ada 4

responden. Berikut Tabel 7 menunjukkan profil berdasar jenis usaha anggota PNPM.

Tabel 7. Profil berdasar jenis usaha anggota PNPM.

No	Jenis usaha	Jumlah	Persentase
1	Kerajinan:		
	1.Anyaman enceng	1	1.3
	2.Kerajinan bambu	4	5.1
	3.Menjahit	1	1.3
2	Dagang:		
	1.Dagang kelontong	50	64.1
	2.Dagang arang dan makanan matang	1	1.3
	3.Dagang dan catering	1	1.3
	4.Dagang HP dan sembako	2	2.6
	5.Dagang lele	2	2.6
	6.Dagang sayur	1	1.3
	7.Dagang susu kedelai	1	1.3
	8.Jual koran	2	2.6
3	Pertanian:		
	1.Perikanan/pertanian/nelayan	4	5.2
	2.Tambak udang	3	3.8
	3.Tambak udang dan dagang	1	1.3
	4.Ternak	4	5.2
Total		78	100.0

8. Profil Berdasar Kesanggupan Membayar

Berdasar kemampuan membayar yang dilakukan responden dalam memanfaatkan dana PNPM terbagi menjadi 3 bagian yaitu : tidak mampu, cukup mampu, mampu, dan sangat mampu. Berdasar hasil survey menunjukkan paling banyak responden merasa mampu membayar dana yang ditawarkan dari PNPM yaitu ada 47 orang atau 60,3 persen. Sedangkan responden semuanya merasa cukup mampu bahkan sangat mampu, dan tidak ada responden yang merasa tidak mampu membayar. Berikut Tabel 8 menunjukkan profil berdasar kesanggupan membayar dana PNPM dari responden.

Tabel 8. Profil berdasar tingkat kemampuan pembayaran reponden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Tidak mampu	0	0
2.	Cukup Mampu	30	38,4
3	Mampu	47	60,3
4	Sangat mampu	1	1,3
Total		78	100

9. Profil Berdasar Frekwensi Pembayaran Dana Bergulir

Berdasar frekwensi pembayaran dana bergulir dari responden yang menjadi anggota PNPM dapat ditunjukkan bahwa rata-rata responden membayar tiap bulan satu kali atau 12 kali sebanyak 62 orang atau 79,5 persen, sedangkan lamanya satu setengah bulan ada 5 orang, ada 6 orang yang membayar tiap 2 bulan sekali atau 6 kali pembayaran, dan ada 4 orang yang membayar 4 bulan sekali tiap tahun atau 3 kali dalam satu tahun. Berikut Tabel 9 menunjukkan profil berdasar frekwensi pembayaran dana bergulir PNPM.

Tabel 9. Profil berdasar tingkat kemampuan pembayaran reponden

No	Keterangan	Frekwensi	Persentase
1	Satu Bulan	62	79,5
	Satu Setengah		
2	Bulan	5	6,4
3	Dua Bulan	6	7,7
4	Tiga Bulan	4	5,1
5	Empat Bulan	1	1,3
Total		78	100

10. Profil Berdasar Pendapatan Responden Sebelum Menjadi Anggota PNPM

Berdasar pendapatan responden anggota PNPM dapat ditunjukkan bahwa paling sedikit responden sebelum ikut anggota PNPM berpenghasilan antara Rp. 100.000 hingga Rp. 500.000 sejumlah 35 orang atau 44,87 %, sejumlah 39 orang berpenghasilan antara diatas Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 atau 50% dari total responden yaitu 78 orang dan dalam

rentangan penghasilan ini yang paling banyak diperoleh dari responden, sedangkan responden yang berpenghasilan diatas Rp. 1.000.000 hanya 4 orang. Berikut Tabel 10 menunjukkan profil berdasar pendapatan responden sebelum menjadi anggota PNPM.

Tabel 10. Pendapatan responden Sebelum ikut PNPM

No	Jumlah	Frekwensi	Persentase
	100.000 –		
1	500.000	35	44,87
2	501.000 – 1.000.000	39	50,00
3	1.000.001 – 1.920.000	4	5,13
Total		78	100.0

11. Profil Berdasar Pendapatan Responden Setelah Menjadi Anggota PNPM

Berdasar pendapatan responden setelah menjadi anggota PNPM dapat ditunjukkan bahwa terdapat kenaikan pendapatan setelah responden mengikuti anggota PNPM yang semula berpenghasilan antara Rp. 100.000 hingga Rp. 500.000 terdapat 35 orang sekarang hanya 19 orang atau 24,36 %, dan yang semula 39 orang berpenghasilan antara diatas Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000 atau 50% menjadi 34 orang atau 43,59 % dari total responden, sedangkan yang semula hanya 4 orang atau 5,13% yang berpenghasilan diatas Rp. 1.000.000 meningkat menjadi 25 orang atau 32,05%. Berikut Tabel 11 menunjukkan profil berdasar pendapatan responden setelah menjadi anggota PNPM.

Tabel 11. Pendapatan Responden setelah mengikuti PNPM

No	Jumlah	Frekwensi	Persentase
	100.000 –		
1	500.000	19	24,36
2	501.000 – 1.000.000	34	43,59
3	1.000.001 – 1.920.000	25	32,05
Total		78	100.0

12. Profil Berdasar Keuntungan Setelah Menjadi Anggota PNPM

Berdasar keuntungan responden dalam berusaha setelah menjadi anggota PNPM dapat ditunjukkan bahwa paling banyak responden memperoleh keuntungan antara Rp. 401.000 hingga Rp.500.000 ada 25 orang atau 32,05% dari total responden sedangkan yang paling sedikit responden memiliki keuntungan Rp. 20.000 hingga Rp. 100.000 yaitu ada 21 orang atau 26,92 %, sedangkan tingkat keuntungan paling tinggi mencapai diatas Rp. 500.000 yaitu 1 orang atau 1,28% dari total. Berikut Tabel 12 menunjukkan profil berdasar tingkat keuntungan usaha.

Tabel 12. Profil berdasar keuntungan setelah PNPM

No	Keuntungan	Jumlah	Persentase
1	20.000 – 100.000	21	26,92
2	101.000 – 200.000	19	24,36
3	201.000 – 300.000	9	11,54
4	300.000 – 400.000	3	3,85
5	401.000 – 500.000	25	32,05
6	➤ 500.000	1	1,28
Total		78	100

Analisis Keefektifan PNPM

Berdasar hasil analisis data profil responden dan analisis efektivitas PNPM dapat dilakukan beberapa kesimpulan bahwa responden terdiri 78 orang dan sebagian besar wanita yaitu analisis keefektifan PNPM yang ditinjau dari beberapa aspek diantaranya:

1. Berdasar aspek anggota PNPM dapat dianalisis, bahwa:

- Keinovatifan, melihat peluang dari anggota masih cukup rendah hal ini dikaitkan dengan jenis usaha yang sudah dilakukan dengan rencana pengembangan usaha, sebagian besar responden menjalankan usaha dengan dagang kelontong,

dan kurang dalam hal membuat inovasi baru seperti memproduksi kerajinan.

- Kesanggupan resiko, dalam hal ini responden sebagian besar sanggup dalam menanggung resiko dapat ditunjukkan dengan data responden membayar asuransi yang dilakukan setiap bulan.
- Komitmen ditunjukkan dengan lamanya anggota mengikuti kegiatan kelompok bahkan ada yang sampai 11 tahun. Hal ini berarti responden memiliki komitmen dalam keanggotaan kelompok usaha, sehingga tawaran dana bergulir dari PNPM kemungkinan juga akan mampu dilakukan dengan baik.
- Kemitraan, dalam hal ini masih terbatas pada mitra yang ada di kelompok atau tawaran pemerintah, sehingga apabila kelompok akan mengembangkan pemasaran masih mengalami kekurangan. Ditunjukkan ketika responden ditanya mengenai pihak yang telah melakukan kerja sama baik dalam pemasaran maupun permodalan rata-rata mereka menjawab hanya dari kelompok usaha yang diikuti anggota saja.

2. Analisis berdasar aspek lembaga PNPM:

- Produksi, dalam hal produksi dapat dikatakan lembaga PNPM kurang memperhatikan aspek produksi. Hal ini ditunjukkan dengan pertanyaan yang ditujukan kepada responden tentang kemungkinan akan mengembangkan usaha rata-rata responden menyatakan untuk melanjutkan usaha seperti biasanya, tetapi untuk hasil produksi kemungkinan akan dipasarkan kepada pihak luar masih kurang. Dapat pula dilihat dari PNPM yang hanya melihat dari jenis produksi dari anggota atau personal yang memanfaatkan dana bergulir dan kurang memantau tentang hasil produksi dan lebih memperhatikan tentang keberhasilan pembayaran dana yang ditawarkan PNPM.
- Keuangan, dari aspek keuangan maka pihak PNPM menunjukkan sangat mendukung karena memang lebih momfokuskan pada sisi keuangan terutama

perguliran dana yang diberikan kepada anggota PNPM.

- c. Fungsi Umum Manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, untuk permasalahan perencanaan, lembaga PNPM cenderung kurang memperhatikan dalam hal manajemen yang disusun oleh pemanfaat dana, karena yang diutamakan adalah berapa besar dana yang dipinjam oleh anggota dan kemampuan membayar penerima dana. Tentang perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan usaha yang dilakukan oleh pemanfaat dana atau kelompok usaha kurang mendapat perhatian oleh PNPM.

3. Analisis berdasar biaya dan manfaat:

Berdasar selisih antara sebelum pendapatan dan setelah PNPM menunjukkan cukup efektif dari perbedaan antara sebelum dan setelah PNPM dalam hal pendapatan.

Kesimpulan

Berdasar hasil analisis profil dan analisis kualitatif deskriptif dari pertanyaan yang ditujukan pada responden menunjukkan bahwa dari 78 responden yang menjadi anggota PNPM paling banyak wanita yaitu 70 orang dan pria hanya 7 orang. Sedangkan kelompok yang banyak memanfaatkan dana bergulir PNPM adalah kelompok Keputren Lestari terdapat 10 kali frekwensi peminjaman. Ditinjau dari frekwensi pembayaran rata-rata kelompok membayar 12 kali dalam satu tahun yang secara umum 1 kali satu bulan, yaitu 10 orang.

Daftar Pustaka

- Bappenas. 2005. "Hasil Kajian Pembelajaran dari Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan"
- Chambers, Robert. 1995. "Pembangunan Desa Mulai Dari Sekarang". Jakarta: LP 3 ES.

Ginanjar, K. (1997). "Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan, Teori, Kebijakan, dan Penerapan". Jakarta.

Gunari Budiretnowati. 2007. "Kajian Tentang Profil UKM Sukses," Laporan Hasil Kajian Tentang Profil UKM Sukses. Jakarta: Kerjasama Deputy Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK dengan PT. Tekno-vasi Sejahtera Mandiri.

Indriyati, Nugahani, Gunawan, Bahrum, dan Purwanti. 2009. "IbM Kelompok Perempuan Usaha Pengolahan Makanan Hasil Laut di Pesisir Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul". Laporan IbM.

Indriyati, dan Nugahani. 2010. "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Studi tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)". Laporan Penelitian Studi Kajian Wanita.

Kuncoro, Mudrajad. 1997. "Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan". Yogyakarta: AMP YKPN.

Lembaran Negara. 2004. "Undang-Undang No.40, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)".

Maswita Jaya. 2006. *Perempuan Indonesia 2005*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Papanek Gustav. 2007. "Dampak PNPM, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pada Peluang Kerja dan Pemberantasan Kemiskinan". Jakarta: April.

Staff Kementerian Bidang Kesra. 2007. "Pengentasan Kemiskinan Harus Diawali dengan Pembukaan Lapangan Kerja yang Aplikatif di Masing-masing Daerah". www.gapri.org.

Sukeji Keppi. 2008. *Perempuan dan Kemiskinan: Profil dan Upaya Pengentasan*,

- Makalah Seminar, Workshop 27 Agustus 2008, Hotel Cakra Kusuma, Jakal KM 5,2 Km YK).
- Winarni.F. (1994). *Peran Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan*. Cakrawala Pendidikan, No.2, Th XIII, Juni.
- Todaro, P., dan Smith, Stephen C. (2004). *"Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga"*. Terjemahan oleh Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Trisunarno Lantip, Eddy Setiadi Soedjono, Agnes Tuti Rumiati, dan Sutikno. 2010. *"Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan"*. (Studi Kasus: Model Pemberdayaan Masyarakat di Desa Metatu, Kab. Gresik Dan Desa Sumberdodol, Kab. Magetan).
- Wuri Josephine. 2009. *Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PN-PM) Mandiri dalam Menanggulangi Kemiskinan, Jurnal Bisnis dan Ekonomi-Antisipasi*. Vol.1, No.1 Juni. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.